



PT. JAMKRIDA
KALIMANTAN BARAT



RENCANA

AKSI KEUANGAN

BERKELANJUTAN

PT JAMKRIDA KALBAR

2025



DAFTAR ISI

Halaman

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2024	1
2. Visi dan Misi Keuangan Berkelanjutan	1
3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	1
4. Program yang akan dilaksanakan dan target waktu (<i>timeline</i>)	3
5. Alokasi Sumber Daya (Dana, SDM dan Mitra Kerja Sama)	8
6. Penanggung Jawab Pelaksanaan Rencana Aksi	9

B. PROSESS PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

C. FAKTOR PENENTU RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

1. Rencana Strategi Bisnis	11
2. Kapasitas Organisasi	13
3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis	14
4. Kerja Sama dengan Pihak Eksternal	16
5. Strategi Komunikasi	17
6. Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi	17
7. Kebijakan Pemerintah	18

D. PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

E. TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

1. Sistem Monitoring dan Evaluasi.....	23
2. Manajemen Risiko atas Program Aksi Keuangan Berkelanjutan .	25

PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT
PT JAMKRIDA KALBAR

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025

A. Ringkasan Eksekutif

1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2024

Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, emiten, dan Perusahaan Publik sebagai mana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Pasal 3 huruf d: bagi LJK berupa BPRKU 1 dan BPRKU 2 serta BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 1 atau BPRKU 2, emiten dengan aset skala kecil, perusahaan efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Beberapa capaian atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2024:

- Terbentuk unit kerja Keuangan Berkelanjutan;
- Terdapat Pedoman Pengelolaan Keuangan Berkelanjutan;
- Dilakukan Edukasi dan internalisasi Aksi Keuangan Berkelanjutan.

2. Visi dan Misi Keuangan Berkelanjutan

- a. Visi: “PT Jamkrida Kalbar menjadi lembaga penjamin yang menerapkan sistem Keuangan Berkelanjutan”
- b. Misi Berkelanjutan :
 - 1) Menciptakan dan mengembangkan produk penjaminan yang mendukung usaha Keuangan Berkelanjutan
 - 2) Meningkatkan portofolio investasi pada kegiatan usaha yang ramah lingkungan.
 - 3) Peduli terhadap kepentingan sosial dan lingkungan hidup.

3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

PT Jamkrida Kalbar adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang bergerak di bidang usaha Penjaminan dan merupakan anggota Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO). Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) terus mendukung

promosi manajemen keberlanjutan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang mengintegrasikan konsep lingkungan, sosial, dan tata kelola *Environment Social and Governance (ESG)*. Dalam upaya ini, ASIPPINDO juga menciptakan inisiatif penjaminan hijau atau “*green guarantee*”.

PT Jamkrida Kalbar sebagai anggota asosiasi menerapkan manajemen berkelanjutan pada penjaminan kredit dengan mengadaptasi model bisnis yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, dengan tetap mematuhi prinsip tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian (*prudential*)

Salah satu inisiatif strategis ESG dalam industri penjaminan adalah konsep penjaminan hijau (*green guarantee*), yang memberikan jaminan bagi model pembiayaan berkelanjutan.

PT Jamkrida Kalbar melakukan praktik *green office* dengan cara mengurangi penggunaan kertas (*paperless*), dan fokus pada keberlanjutan lingkungan dengan menggunakan produk/benda yang ramah lingkungan dan material yang bisa didaur ulang (*recycle*), termasuk membatasi penggunaan benda berbahan plastik sekali pakai dalam operasional perusahaan.

PT Jamkrida Kalbar menerapkan pengelolaan lembaga secara berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui strategi, yaitu:

- a. Optimalisasi penjaminan kredit/pembiayaan yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan.
- b. Peningkatan portofolio investasi pada kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
- c. Penguatan wawasan kepada pegawai akan pentingnya keuangan berkelanjutan.
- d. Penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/*Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- e. Pemberdayaan fungsi unit kerja yang sudah ada untuk implementasi program yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan.

4. Program yang akan dilaksanakan dan target waktu (*timeline*):

a. Jangka waktu 5 (lima) tahun

NO.	TARGET KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR PENCAPAIAN	TIMELINE/TAHUN
1	Pembentukan Unit Khusus Pengelolaan Keuangan Berkelanjutan.	Terbentuknya unit / satuan kerja khusus yang mengelola seluruh aktivitas keuangan berkelanjutan.	2024
2	Penyusunan Pedoman Perusahaan Keuangan Berkelanjutan.	Pedoman Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi.	
3	Implementasi target dan Alokasi Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	Alokasi dana TJSL 2024 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).	
1	Edukasi Aksi Keuangan Berkelanjutan bekerjasama dengan pihak eksternal seperti Regulator dan Lembaga/Instansi terkait lainnya.	✓ Direksi dan para Kepala Bagian telah mengikuti training lingkungan hidup tingkat dasar atau pelatihan sejenis lainnya. ✓ Peningkatan kompetensi Karyawan Satuan Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan	2025

2	Implementasi target dan Alokasi Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	Alokasi dana TJSL 2025 sebesar Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah).	
1	Edukasi Aksi Keuangan Berkelanjutan bekerjasama dengan pihak eksternal seperti Regulator dan Lembaga/Instansi terkait lainnya (lanjutan).	Melakukan pelatihan kepada pegawai analis penjaminan kredit sebanyak 1 kali kepada 3 orang	2026
2	Implementasi target dan Alokasi Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	Alokasi dana TJSL 2026 sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).	
1	Edukasi Aksi Keuangan Berkelanjutan bekerjasama dengan pihak eksternal seperti Regulator dan Lembaga/Instansi terkait lainnya (lanjutan)	Melakukan pelatihan Penyusunan Laporan Keberlanjutan kepada Sekretaris Perusahaan (<i>Corporate Secretary</i>)	2027
2	Implementasi target dan Alokasi Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	Alokasi dana TJSL 2027 sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).	

1	Edukasi Aksi Keuangan Berkelanjutan bekerjasama dengan pihak eksternal seperti Regulator dan Lembaga/Instansi terkait lainnya (lanjutan)	Terlaksananya kampanye peduli lingkungan.	2028
2	Implementasi target dan Alokasi Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	Alokasi dana TJSL 2026 sebesar Rp.115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah).	

b. Jangka waktu 1 (satu) tahun (Tahun 2025)

No.	Uraian Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu/Timeline
1	Penguatan wawasan kepada pegawai tentang pentingnya memperhatikan lingkungan untuk mendukung usaha berkelanjutan dengan melakukan internalisasi Pedoman Keuangan Berkelanjutan	Agar insan Jamkrida Kalbar memahami dan melakukan praktik pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai Pedoman Keuangan Berkelanjutan	Insan Jamkrida Kalbar dalam kegiatan usaha dan kehidupan keseharian melakukan praktik yang mendukung Keuangan Berkelanjutan.	Triwulan 1 Triwulan 2 2025

2	Kampanye Internal Keuangan Berkelanjutan: Pembuatan banner untuk kampanye mendukung Keuangan Berkelanjutan: Hemat Energi Listrik: Padamkan lampu dan AC apabila meninggalkan ruang kerja. Hemat Kertas: Periksa kembali kebenaran naskah/dokumen anda sebelum mencetak. Teliti adalah bagian dari menghemat kertas. Hemat air: Gunakan air secukupnya.	Agar insan Jamkrida Kalbar memahami dan menyadari bahwa penting untuk melakukan penghematan listrik, air dan kertas. Pembangkit listrik yang ada di Kalbar menggunakan Bahan Bakar Minyak dan Batu Bara yang diperoleh dari eksplorasi Sumber Daya Alam yang jika dilakukan terus menerus akan berdampak pada kelestarian lingkungan. Bahan baku kertas adalah pulp (bubur kertas) yang berasal dari serat selulosa tumbuhan, utamanya kayu hutan tanaman industri seperti akasia (<i>Acacia mangium</i>) dan eukaliptus (<i>Eucalyptus sp</i>). Pembukaan lahan	Terjadi efisiensi pemakaian daya listrik, efisiensi penggunaan kertas, efisiensi penggunaan air.	Triwulan 3 2025
---	---	--	---	------------------------

		Hutan Tanaman Industri skala besar dilakukan dengan penebangan pohon/hutan alam yang berlebihan sehingga merusak ekosistem alam.		
3	Penjaminan Kredit/Pembiayaan untuk sektor usaha yang ramah lingkungan.	Penjaminan kredit/pembiayaan yang ramah lingkungan menunjang keberlangsungan usaha keberlanjutan.		Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3, Triwulan 4. 2025
4	Investasi yang berisiko rendah pada instrumen investasi yang sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Agar investasi yang dilakukan sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, mendapatkan hasil (return) yang baik dan risiko rendah.		Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3, dan Triwulan 4. 2025

5	Mengalokasikan dan menyalurkan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Alokasi dana TJSL 2025 dengan kisaran 2,5% sampai dengan 3 % dari laba.	Menyalurkan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai dengan peruntukannya sebagai bentuk kepedulian social dan lingkungan agar terjadi keseimbangan antara kegiatan ekonomi dengan lingkungan dan sosial.	Terdapat daftar Lembaga/organisasi penerima dan jumlah dana yang disalurkan.	Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3, dan Triwulan 4. 2025
---	--	--	--	--

5. Alokasi Sumber Daya (dana, manusia dan mitra kerjasama) untuk melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

a. Dana

Dana untuk melaksanakan aksi keuangan yang berkelanjutan berasal dari anggaran PT Jamkrida Kalbar sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) di luar alokasi dana TJSL/CSR.

b. Manusia

Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan Aksi Keuangan yang Berkelanjutan pada PT Jamkrida Kalbar didukung oleh:

- 1) 2 (dua) orang anggota Direksi (Direktur Utama dan Direktur Penjaminan dan Pemasaran);
- 2) 3 (tiga) orang Kepala Bagian (Kepala Bagian Penjaminan dan Pemasaran, Kepala Bagian Keuangan, Administrasi dan Umum, Kepala Bagian Legal dan Subrogasi);
- 3) 1 (satu) orang Sekretaris Perusahaan;
- 4) 1 (satu) orang Satuan Pengawas Intern (SPI);
- 5) 12 (dua belas) orang staf.

c. Mitra Kerja Sama

Mitra Kerja Sama Aksi Keuangan Berkelanjutan:

- 1) Penjaminan Kredit/Penjaminan Pinjaman (*green guarantee*) bekerja sama dengan Bank Umum (PT Bank Kalbar), Bank Perkreditan Rakyat (BPR Khatulistiwa), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) CU Keling Kumang, CU Mura Kopa, CU Tri Tapang Kasih, CU Pancur Solidaritas, CU Semandang Jaya, CU Semarang, CU Pancur Kasih, CU Keluarga Kudus, CU Khatulistiwa Bhakti.
- 2) Pengelolaan lingkungan kerja hijau berkoordinasi dengan warga di sekitar kantor.
- 3) Penyaluran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dengan prioritas sasaran adalah Kabupaten/Kota yang sudah menjadi pemegang saham pada PT Jamkrida Kalbar.

6. Pegawai, pejabat atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

- a. Kepala Bagian Penjaminan dan Pemasaran sebagai penanggung jawab penjaminan hijau (*green guarantee*).
- b. Kepala Bagian Keuangan, Administrasi dan Umum sebagai penanggung jawab pengelolaan investasi dan lingkungan.
- c. Sekretaris Perusahaan sebagai penanggung jawab kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/*Corporate Social Responsibility* (CSR).

B. Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ini melibatkan Direksi sebagai penanggung jawab utama operasional perusahaan, para Kepala Bagian yang membawahi para staf, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Intern (SPI).

Tim penyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

No.	Nama	Jabatan
1	Martinus Damamang	Direktur Utama
2	Teguh Wahyudi	Direktur Penjaminan dan Pemasaran
3	Robiansah	Kabag Penjaminan dan Pemasaran
4	Thesar Juniardi	Kabag Keuangan, Administrasi dan Umum
5	M. Sofiyani	Kabag Legal dan Subrogasi
6	Rasmi Ikkada	SPI
7	Amiq Fitriyanti	Sekretaris Perusahaan

Dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Jamkrida Kalbar merujuk kepada berbagai regulasi dan pedoman teknis, yaitu:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perjaminan;
4. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, mencakup Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keberlanjutan;
5. Pedoman teknis yang diterbitkan oleh regulator;
6. Rencana Bisnis PT Jamkrida Kalbar.

C. Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan:

1. Rencana Strategis Bisnis

PT Jamkrida Kalbar telah menyusun Rencana Bisnis 5 (lima) tahun untuk tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan melihat kondisi perusahaan pada akhir tahun 2021, maka pada tahun 2022 sampai dengan 2026 PT Jamkrida Kalbar menetapkan kebijakan penjaminan kredit dengan memperhatikan kondisi ekonomi daerah dan nasional serta mempertimbangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kegiatan usaha perseroan.

a. Aspek Penjaminan dan Pemasaran Tahun 2022 - 2026

- 1) Meningkatkan kerjasama penjaminan dengan berbagai pihak dan memperluas jaringan kerjasama dengan perbankan maupun non perbankan.
- 2) Secara bertahap melakukan kajian pengembangan produk penjaminan antara lain dan tidak terbatas pada kajian penjaminan pembiayaan syariah dan kajian dalam rangka meningkatkan layanan yang kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Kalimantan Barat.
- 3) Pembagian wilayah kerja pemasaran dalam rangka meningkatkan pencapaian target penjaminan;
- 4) Bekerja sama dengan Agen Penjamin untuk memasarkan dan menjual produk penjaminan.

b. Aspek Keuangan, Administrasi, Kelembagaan (Organisasi) dan Sumber Daya Manusia.

1) Keuangan:

- a) Memaksimalkan portofolio investasi dengan menempatkan dana investasi pada instrument investasi yang sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada lembaga keuangan yang kredibel dan sehat.
- b) Menjaga rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio penjaminan (*gearing ratio*), rasio klaim dan rasio pendapatan dan biaya operasional pada posisi yang sehat.

2) Administrasi:

- a) Meningkatkan pengelolaan administrasi dan penyimpanan dokumen (naskah korporasi) dengan baik dan aman berdasarkan sistem kearsipan yang baik secara konvensional maupun digital.

3) Kelembagaan (organisasi) dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kompleksitas kelembagaan maka diperlukan:

- a) Melakukan penyesuaian Struktur Organisasi yang ramping namun sesuai dengan kebutuhan.
- b) Melakukan Pelatihan Sumber Daya Manusia yang ada bekerja sama dengan pihak luar dan pelatihan intern (*inhouse training*) dengan materi yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing, meliputi: bidang penjaminan, manajemen risiko, pengelolaan Sumber Daya Manusia, perencanaan, keuangan, akuntansi dan pengawasan intern.
- c) Mempersiapkan Sumber Daya Manusia dengan melakukan rekrutmen SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pertumbuhan dan peningkatan volume usaha.
- d) Melakukan penyempurnaan sistem Teknologi Informasi sesuai dengan kondisi keuangan dan kebutuhan perusahaan.

Dalam rencana bisnis tahunan (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun 2025 telah disusun sasaran dan strategi bisnis, yakni:

- 1) Memperoleh laba pada Laporan Keuangan per-31 Desember 2025 dan memberikan dividen kepada Pemegang Saham;
- 2) Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”.
- 3) Penguatan lembaga dengan menambah staf sesuai kebutuhan organisasi dan beban kerja.
- 4) Melakukan kerjasama dengan para pihak: Perbankan, Koperasi (dalam kegiatan penjaminan) dan Pialang Asuransi (dalam kegiatan re_asuransi dan *co_guarantee*) dalam rangka mitigasi risiko penjaminan/risiko klaim.
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia dengan pendidikan dan pelatihan.
- 6) Penambahan inventaris kantor dan pengadaan sarana kerja.

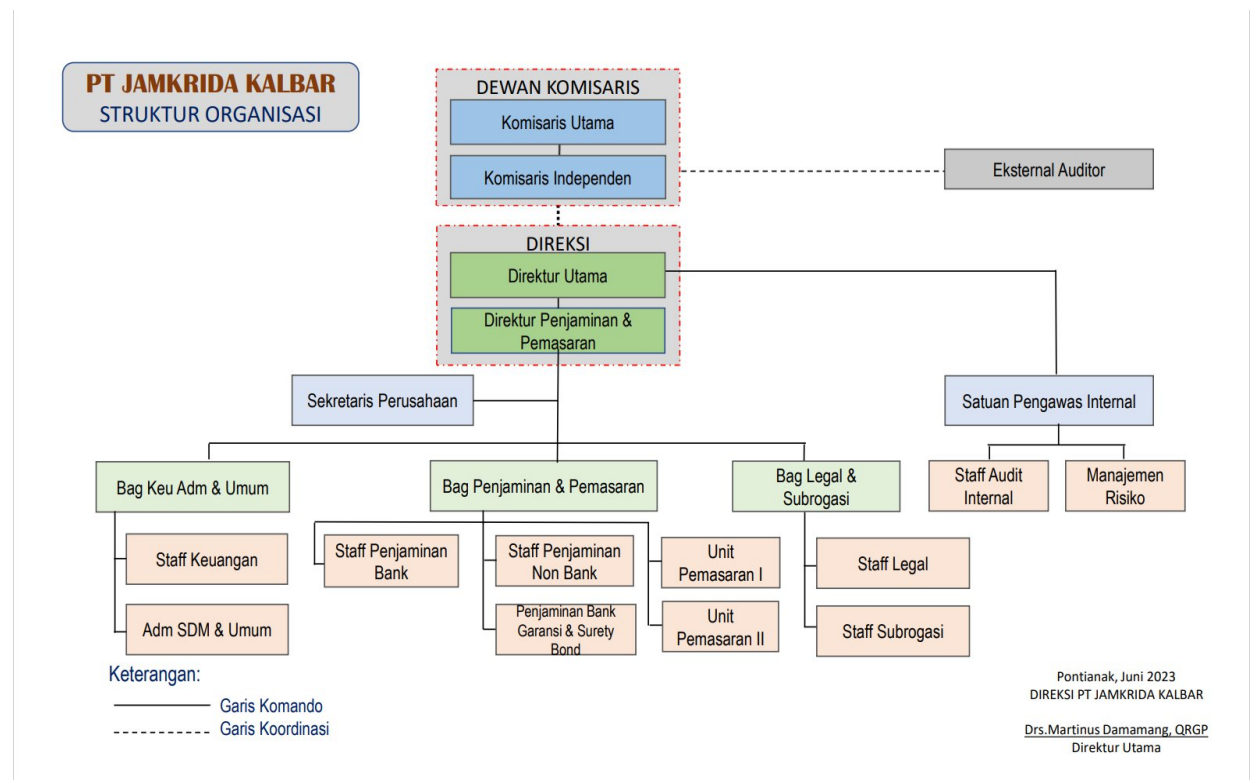
2. Kapasitas Organisasi

Secara kelembagaan, PT Jamkrida mampu melaksanakan aksi keuangan berkelanjutan karena didukung oleh organisasi yang baik.

Organisasi PT Jamkrida Kalbar mempunyai struktur yang disesuaikan kebutuhan saat ini, dengan mempertimbangkan:

- Visi dan misi perusahaan;
- Bisnis utama perusahaan;
- Kapasitas/volume usaha;
- Kemampuan keuangan lembaga;
- Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia;
- Mitigasi Risiko dalam menjalankan usaha.

Struktur Organisasi PT Jamkrida Kalbar:



3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis

a. Kondisi Keuangan

Kondisi Keuangan berdasarkan Laporan Keuangan PT Jamkrida Kalbar per 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

1) Laporan Posisi Keuangan per 30 September 2024

PT JAMKRIDA KALBAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 30 SEPTEMBER 2024

	Sep-24
ASET	
1. KAS DAN SETARA KAS	41,668,397,115.00
2. INVESTASI	88,580,433,214.03
3. PIUTANG IMBAL JASA PENJAMINAN (IJP)	-
4. ASET LANCAR LAINNYA	119,395,462,495.74
5. ASET TETAP	1,463,988,079.27
6. ASET LAINNYA	1,547,019,857.41
JUMLAH ASET	252,655,300,761.45
LIABILITAS	
1. UTANG KLAIM	-
2. UTANG PAJAK	-
3. CADANGAN KLAIM	7,097,218,548.58
4. UTANG PENJAMINAN ULANG	-
5. PENDAPATAN DITANGGUHKAN	158,657,511,249.31
6. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN	-
7. LIABILITAS LAINNYA	15,156,716,221.24
JUMLAH LIABILITAS	180,911,446,019.13
EKUITAS	
1. MODAL	65,500,000,000.00
2. CADANGAN UMUM	1,778,428,049.52
3. CADANGAN KLAIM	
4. SALDO LABA	4,465,426,692.80
JUMLAH EKUITAS	71,743,854,742.32
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	252,655,300,761.45

2) Laporan Laba Rugi per 30 September 2024

PT JAMKRIDA KALBAR
LAPORAN LABA / RUGI KOMPREHENSIF
PER 30 SEPTEMBER 2024

	Sep-24
Volume Penjaminan	7,365,116,650,312.83
IJP Cash Basis	82,409,829,083.73
PENDAPATAN	
1. Pendapatan IJP Bersih	10,025,579,703.96
2. Pendapatan Investasi Bersih	2,352,825,528.14
3. Pendapatan lainnya bersih	5,228,631,624.13
BEBAN	
4. Beban Klaim	- 11,740,336,122.17
5. Beban Usaha	- 3,702,672,807.09
6. Beban Lainnya	- 897,051,993.00
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	1,266,975,933.97
Pajak Penghasilan	
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	1,266,975,933.97

3) Rasio Keuangan dan Tingkat Kesehatan PT Jamkrida Kalbar per 30 September 2024

PT JAMKRIDA KALBAR PERHITUNGAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PER 30 SEPTEMBER 2024 UNAUDITED									
ASPEK PENILAIAN		RUMUS							NILAI
1. RASIO LIKUIDITAS CURRENT RATIO	=	ASET LANCAR LIABILITAS LANCAR	x	100					
	=	93,134,918,686 23,218,390,439	x	100	=	401.13			1
2. GEARING RATIO	=	PENJAMINAN ULANG YG DITANGGUNG SENDIRI EKUITAS							
	=	2,202,074,853,619 71,743,854,742			=	30.69			2
3. RENTABILITAS a. ROA	=	L/R SEBELUM PAJAK TOTAL ASET	x	100					
	=	1,266,975,934 252,655,300,761	x	100	=	0.50			3
b. BOPO	=	BEBAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL	x	100					
	=	15,443,008,929 17,607,036,856	x	100	=	87.71			2
c. RATIO KLAIM THDP IJP	=	BEBAN KLAIM NETTO IJP NETTO	x	100					
	=	11,740,336,122 10,025,579,704	x	100	=	117.10			5
d. KOMPOSIT RENTABILITAS	=	(30%*ROA)+(35%*BOPO)+(35%*RKT1)							
	=	3.35							3
4. SELF ASSESSMENT	=	SANGAT BAIK							1
5. KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN = (10%*RL)+(35%*xGR)+(35%*R)+(20%*SA)	=				2.05	----->			SEHAT

b. Kapasitas Teknis

Dalam melaksanakan kegiatan usaha PT Jamkrida Kalbar telah memanfaatkan Teknologi Informasi. Tujuan penggunaan teknologi informasi PT Jamkrida Kalbar adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan dan memudahkan pekerjaan-pekerjaan teknis.

Teknologi informasi adalah setiap peralatan atau sistem atau subsistem peralatan yang saling berhubungan, digunakan dalam akuisisi, penyimpanan, manipulasi, manajemen, pergerakan, kontrol, tampilan, pengalihan, pertukaran, transmisi, atau penerimaan data atau informasi secara otomatis dengan menggunakan perangkat keras dan lunak (*hardware dan software*) yang diatur pemanfaatannya dengan sebuah pedoman, prosedur dan layanan (termasuk layanan pendukung), serta sumber daya yang cukup.

Manfaat penggunaan Teknologi Informasi pada PT Jamkrida Kalbar:

1. Memberikan kemudahan Bagian Penjaminan, Bagian Keuangan Administrasi dan Umum, Bagian Legal dan Subrogasi dan Sekretaris Perusahaan dalam melakukan pengelolaan data penjaminan, keuangan dan administrasi.
2. Memudahkan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan dan pelaporannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah (pemegang saham).
3. Membuat dan mengarsipkan dokumen dari analog menjadi dokumen digital sehingga mudah dan cepat untuk diakses.
4. Memudahkan komunikasi secara elektronik/digital kepada mitra bisnis dan *stakeholders*, pelayanan pengaduan konsumen, dan keterbukaan informasi publik.

4. Kerjasama dengan pihak eksternal

PT Jamkrida Kalbar telah membangun kerjasama dengan beberapa pihak eksternal yang berkaitan dengan isu ekonomi berkelanjutan, sosial dan lingkungan hidup. Beberapa pihak eksternal tersebut, diantaranya dalam bidang:

Penjaminan kredit UMKM yang ramah lingkungan dan berkelanjutan bekerja sama dengan PT Bank Kalbar, Perumda BPR Khatulistiwa dan beberapa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang ada di Kalbar.

Dalam menempatkan investasi yang mendukung program yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan, PT Jamkrida Kalbar bekerjasama dengan beberapa sekuritas dan lembaga keuangan untuk melakukan pembelian Obligasi Infrastruktur yang mendukung pembangunan berkelanjutan, antara lain: Mandiri Sekuritas, Bank Permata, Bank BNI dan Bank BTN.

Dalam menyalurkan dana CSR, PT Jamkrida Kalbar bekerjasama dengan pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat fokus pada pembelian makanan tambahan untuk perbaikan gizi balita untuk mencegah *stunting*.

5. Strategi Komunikasi

PT Jamkrida Kalbar senantiasa membangun komunikasi dalam rangka menjalin hubungan baik dengan mitra bisnis, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan kepada perusahaan. Perusahaan juga berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi sebagai landasan pelaksanaan dan pengelolaan keterbukaan informasi melalui berbagai media sosial, media massa dan *website* perusahaan.

6. Sistem monitoring evaluasi, dan mitigasi

a. Monitoring dan Evaluasi

Sistem Monitoring dan Evaluasi Dalam rangka melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan, perusahaan akan menerapkan mekanisme monitoring, diantaranya: Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, Rapat Direksi dengan Kepala Bagian dan Staf Dalam rangka memonitoring perkembangan terkini terhadap berbagai program kerja dan monitoring kinerja keuangan dan non keuangan.

b. Mitigasi

Mitigasi yang dilakukan perusahaan, sebagai berikut :

PT Jamkrida Kalbar telah menerapkan sistem pengendalian yang merujuk kepada konsep “*Three Lines of Defense*” yang melibatkan seluruh unit kerja termasuk Satuan Pengawas Intern (SPI) dan Manajemen Risiko.

First Line of Defense dikelola oleh masing-masing unit kerja terkait sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Penerapan fungsi *First Line of Defense* terkait dengan mitigasi adalah, sebagai berikut:

1. Peningkatan penguasaan proses kerja.
2. Melakukan identifikasi dan pengukuran kembali risiko-risiko operasional yang berkaitan dengan aktivitas.
3. Peningkatan pengawasan dan pelaksanaan tindakan preventif yang diperlukan agar dampak dan frekuensi risiko dapat diminimalisir.

Second Line of Defense dikelola oleh masing-masing bagian melalui komite yang dibentuk (Komite Penjaminan/Klaim, Komite Audit, Komite Investasi, Komite Pengadaan Barang/Jasa. Penerapan fungsi *Second Line of Defense* terkait dengan mitigasi adalah, sebagai berikut :

1. Peningkatan fungsi *check & balance* guna mendukung operasional bisnis dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*).
2. Internisasi pentingnya menjaga bisnis dari risiko & kepatuhan kepada semua jenjang organisasi.
3. Implementasi *Enterprise Risk Management* untuk mengelola risiko secara menyeluruh dan terintegrasi .
4. Penyempurnaan kebijakan pedoman, prosedur dan kerangka manajemen risiko yang komprehensif sesuai perkembangan dan dinamika organisasi.

Third Line of Defense dikelola oleh Satuan Pengawas Intern (SPI). Penerapan fungsi *Third Line of Defense* terkait dengan mitigasi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan mekanisme *Whistle Blowing System* serta kebijakannya.
2. Melakukan audit/pemeriksaan intern secara berkala untuk meningkatkan budaya sadar risiko dan budaya anti fraud.
3. Melakukan pemeriksaan khusus jika ada indikasi penyimpangan dan hal-hal yang harus segera ditindaklanjuti dan ditangani.

7. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah membangun fondasi keuangan berkelanjutan yang kuat dan bahkan termasuk paling maju diantara negara emerging economy, seperti yang tercermin dalam laporan *Sustainable Banking and Finance Network* (SBFN). Upaya ini didukung oleh inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan sejak 2015 dan mengembangkan taksonomi hijau yang terencana untuk menjadi taksonomi berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia telah mengembangkan strategi pendanaan yang inovatif melalui *Integrated National Financing Framework* (INFF), yang menciptakan koherensi antara perencanaan dan strategi pendanaan untuk SDGs. Tujuan dari strategi ini adalah mengintegrasikan kebijakan dan menjadi pendekatan tata kelola serta instrumen pendanaan dari pemerintah dan swasta. Indonesia juga telah menjadi pelopor dalam pendanaan inovatif, termasuk melalui peluncuran Green Sukuk pertama dan pengembangan pendanaan berbasis keagamaan (*Islamic financing*), pendanaan campuran, dan investasi yang berdampak sosial.

Pendanaan dari pihak nonpemerintah diperkuat dan diselaraskan dengan target pembangunan berkelanjutan. Kapasitas pendanaan dari sumber pemerintah dan nonpemerintah dioptimalkan melalui berbagai skema pendanaan inovatif, sebagaimana mandat dalam Peraturan Presiden No. 111 tahun 2022 tentang SDGs. Regulasi ini diharapkan dapat membimbing sektor keuangan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek berdampak dan menggunakan inovasi keuangan seperti *blended financing*.

Kebijakan pemerintah ini menandai dimulainya standar baru dalam sektor keuangan, membawa Indonesia menuju era yang lebih adil dan berkelanjutan. Transformasi ini menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mencapai keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam skala global.

D. Prioritas dan Uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Program aksi untuk penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan:

1. Program Pertama (Prioritas)

PT Jamkrida Kalbar menjamin kredit yang ramah lingkungan (*green guarantee*)

a. Dasar Pemikiran

1) Prioritas Implementasi Keuangan Berkelanjutan PT Jamkrida Kalbar menetapkan prioritas implementasi Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan Pedoman Teknis POJK No. 51/POJK.03/2017. PT Jamkrida Kalbar memprioritaskan pengembangan portofolio produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan yaitu penjaminan kredit dan penyusunan sistem pengawasan serta pelaporan penerapan keuangan berkelanjutan.

2) Alasan Pemilihan Prioritas

Secara umum, tantangan yang dihadapi terkait implementasi keuangan berkelanjutan adalah masih rendahnya pemahaman mengenai penerapan keuangan berkelanjutan dan masih kurangnya perhatian serta kesadaran

akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Selain itu belum memadainya pemahaman karyawan terhadap penerapan aksi keuangan berkelanjutan serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia PT Jamkrida Kalbar saat ini. Kendati demikian, peningkatan wawasan akan terus diupayakan sehingga sumber daya manusia pada PT Jamkrida Kalbar mampu menangani kegiatan aksi keuangan berkelanjutan yang ditunjang dengan peningkatan kompetensi di bidang keuangan berkelanjutan sesuai bidang usaha yaitu penjaminan kredit.

3) Aktivitas Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Adapun aktivitas dari implementasi Program Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan Petugas Teknis

Dalam Pedoman Teknis POJK No. 51/POJK.03/2017 menyebutkan bahwa dalam rangka penyesuaian struktur organisasi dapat dilakukan dengan menambah tupoksi Keuangan Berkelanjutan pada unit yang sudah ada atau menambah unit khusus yang menjalankan program-program Keuangan Berkelanjutan. PT Jamkrida Kalbar tidak membentuk unit khusus tapi secara keseluruhan aksi keuangan berkelanjutan dikelola oleh Satuan Pengendalian Intern (SPI) dibantu dan didukung oleh Bagian Pemasaran dan Penjaminan, Bagian Keuangan Administrasi dan Umum, Bagian Legal dan Subrogasi dan Sekretaris Perusahaan.

2. Penyusunan Pedoman Perusahaan Keuangan Berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan selaras dengan berbagai ketentuan yang berlaku mengenai Keuangan Berkelanjutan dan peraturan yang lainnya mengenai isu sosial dan lingkungan hidup, disusun Pedoman Perusahaan Keuangan Berkelanjutan sebagai panduan bagi Pengelola Keuangan Berkelanjutan untuk melaksanakan program dan aktivitas Keuangan Berkelanjutan.

3. Pelaksanaan edukasi bekerjasama dengan pihak ekstern seperti regulator dan lembaga/instansi yang *corcern* terhadap isu-isu ekonomi dan lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dibutuhkan edukasi secara menyeluruh. Adapun edukasi Intern yang akan dilaksanakan mencakup sebagai berikut:

- a. Peningkatan Peningkatan Kapasitas Pengurus terkait Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- b. Peningkatan kompetensi karyawan tentang Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- c. Pelatihan Penyusunan Laporan Berkelanjutan kepada Sekretaris Perusahaan, dan karyawan lain yang menangani keuangan berkelanjutan.
- d. Kampanye peduli lingkungan kepada seluruh karyawan PT Jamkrida Kalbar.
- e. Implementasi Target dan Alokasi Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Aksi Keuangan Berkelanjutan, PT Jamkrida Kalbar melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menekankan kepada sektor kepedulian sosial budaya, ekonomi khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan kondisi dan skala prioritas dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

b. Kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Kegiatan Utama

Kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

No	URAIAN KEGIATAN	PERIODE AWAL	PERIODE AKHIR	SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
1.	Melakukan penjaminan kredit bagi usaha mikro kecil dan menengah yang ramah lingkungan dengan	Januari 2025	Desember 2025	1. Sumber Dana PT Jamkrida Kalbar 2. SDM PT Jamkrida Kalbar 3. Mitra	Direksi

	tujuan usaha berkelanjutan			Kerja Sama Penjaminan (Bank, Koperasi, Dinas/Institusi)	
2	Investasi Berkelanjutan	Januari 2025	Desember 2025	1. Sumber Dana PT Jamkrida Kalbar 2. SDM PT Jamkrida Kalbar 3. Lembaga Keuangan/Manajer Investasi/Bank Kustodian	Direksi
3	Penganggaran dan Penyaluran Dana Taanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) / Corporate Social Responsibility (CSR)	Januari 2025	Desember 2025	1. Sumber Dana PT Jamkrida Kalbar 2. SDM PT Jamkrida Kalbar 3. Pemprov/ Pemkab/Kota di Kalbar	Direksi

c. Sumber Daya

- 1) Sumber Dana
- 2) Sumber Daya Manusia
- 3) Mitra Kerja Sama

d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program Keberhasilan dari pelaksanaan Program dan Aktivitas Keuangan Berkelanjutan ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Membandingkan realisasi Program Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan timeline dan indikator kinerja lainnya yang telah direncanakan.
- b. Membandingkan realisasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan timeline, anggaran dan indikator kinerja lainnya yang telah direncanakan.
- c. Membandingkan realisasi Penjaminan Kredit yang kegiatan usaha nya masuk dalam kategori berkelanjutan dengan rencana yang telah dibuat.
- d. Membandingkan realisasi penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) / Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan dengan rencana (target anggaran) yang sudah disusun.

E. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai kemajuan secara keseluruhan, meliputi:

- a. Pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB (PIC)	WAKTU
1	Monitoring realisasi penunjukan pelaksana kegiatan aksi keuangan berkelanjutan.	Direksi	Mei – Juni 2025
2	Monitoring realisasi penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan keuangan berkelanjutan	Direksi	Juli - September 2025
3	Monitoring realisasi pelaksanaan edukasi Intern kegiatan aksi keuangan berkelanjutan	Bagian Keuangan Adminsitasi dan Umum (SDM)	Desember 2025
4	Monitoring realisasi Tanggung Jawab	Sekretaris	Desember

	Sosial dan Lingkungan	Perusahaan dan Bagian Keuangan	2025
5	Monitoring Investasi Keuangan Berkelanjutan	Bagian Keuangan Administrasi dan Umum	Juni & Desember 2025
6	Monitoring penjaminan kredit UMKM keuangan berkelanjutan	Bagian Penjaminan dan Pemasaran	Juni & Desember 2025

- b. Penentuan waktu untuk mengukur realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan *time line* yang sudah dibuat.

Untuk memastikan efektivitas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diperlukan pengukuran secara berkala. Adapun pelaporan berikut dengan penentuan waktu untuk melakukan pengukuran realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut:

Periode Pengukuran Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

NO	AKTIVITAS	PERIODE	PIC
1	Laporan Program Aksi Keuangan Berkelanjutan	Tahunan	Sekretaris Perusahaan
2	Laporan Realisasi Penjaminan Kredit kepada Kegiatan Usaha Kategori Berkelanjutan	Triwulanan	Bagian Penjaminan
3	Laporan Berkelanjutan	Tahunan	Sekretaris Perusahaan

- c. Tindak lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan belum dapat diimplementasikan sesuai dengan program kerja dan *time line* yang telah direncanakan, PT Jamkrida Kalbar akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Mengkaji ulang indikator kinerja yang digunakan untuk penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan periode berikutnya.
2. Melakukan revisi atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

3. Mengkaji ulang pedoman pelaksanaan program aksi keuangan berkelanjutan yang disusun, jika terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan maka akan dilakukan penyesuaian.

- d. Mitigasi Risiko dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

Tidak berjalannya Aksi Keuangan Berkelanjutan dapat berdampak pada sejumlah jenis risiko yang dikelola PT Jamkrida Kalbar. Adapun pemetaan & pengelolaan risiko terhadap Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

NO	JENIS RISIKO	TINGKAT RISIKO	KEBIJAKAN PENGELOLAAN
1	Penjaminan Kredit/Klaim	M - H	Kendali & Mitigasi
2	Likuiditas dan Investasi	M - H	Terima & Kendali
3	Operasional	M	Terima
4	Strategik	L	Terima
5	Hukum	L	Terima
6	Pasar	L - M	Terima & kendali
7	Reputasi	L	Terima
8	Kepatuhan	L	Terima

*Keterangan: L = Low (rendah)
M= Medium (sedang)
H= High (tinggi)

2. Manajemen Risiko Atas Program Aksi Keuangan Berkelanjutan

a. Tata Kelola Risiko

1. Pembentukan unit kerja pengelola keuangan berkelanjutan.
2. Penyusunan Kebijakan berupa Pedoman Pengelolaan Keuangan Berkelanjutan.
3. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terhadap penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan termasuk kepada penyaluran kredit kepada Kegiatan Usaha Kategori Berkelanjutan.
4. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kepedulian dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Reputasi. Pengurus melakukan peran dan

tanggung jawabnya dan menjadi *role model* dalam rangka meningkatkan citra PT Jamkrida Kalbar kepada *stakeholder*.

5. Penanganan setiap berita/issu negatif yang terkait dengan PT Jamkrida Kalbar dilakukan klarifikasi agar berita tidak merugikan bisnis PT Jamkrida Kalbar.
6. Penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah disetujui Dewan Komisaris untuk mencapai target yang telah ditentukan.

b. Kerangka Manajemen Risiko

1. Strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat risiko dan kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab sesuai jenjang. PT Jamkrida Kalbar telah membentuk Satuan Pegawai Intern sebagai unit kerja yang berfungsi memperkuat implementasi fungsi Manajemen Risiko.
2. Kecukupan atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang sejalan dengan pengelolaan risiko seperti penetapan kewenangan penjaminan kredit, klaim, penjaminan pengadaan barang jasa, investasi, pengadaan inventaris dilakukan analisa oleh komite yang dibentuk untuk selanjutnya diputuskan oleh direksi.
3. Strategi pengelolaan risiko reputasi sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan dalam menangani masalah Risiko Reputasi akan disampaikan ke Direksi dibantu dengan bagian Legal.
4. Rencana bisnis PT Jamkrida Kalbar disusun oleh direksi dan disetujui Dewan Komisaris. Langkah-langkah penyusunannya dilakukan secara bersama dengan Kepala Bagian Penjaminan dan Pemasaran, Kepala Bagian Keuangan Administrasi dan Umum, Kepala Bagian Legal dan Subrogasi, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Intern.
5. Menjaga seluruh kebijakan dan prosedur yang telah dibuat serta melaksanakan fungsi masing-masing bagian sesuai dengan kebijakan & prosedur yang telah ditetapkan.

c. Proses Manajemen Risiko

1. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Sistem Informasi Manajemen dan Pengendalian Risiko.
2. Kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mendukung proses manajemen risiko.
3. Sistem Pengendalian Risiko dilakukan dengan cara saling koordinasi antara Manajemen Risiko dan bagian lain terhadap setiap laporan yang wajib dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan, dimana kegiatan pemantauan tersebut telah menjadi agenda di dalam kerangka kerja perbaikan tata kelola perusahaan.
4. Setiap unit terkait berkoordinasi dalam rangka review dan penyempurnaan terhadap Peraturan Perusahaan/SOP/Kebijakan Intern PT Jamkrida Kalbar guna mendukung proses bisnis.

LEMBAR PERSETUJUAN

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2025 ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perudahaan Publik. Rencana aksi disusun berdasarkan analisis faktor intern dan eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap mengendalikan risiko yang mungkin timbul pada tahap implementasinya.

Pontianak, November 2024

DIREKSI PT JAMKRIDA KALBAR


Martinus Damamang
Direktur Utama

PT. JAMKRIDA
KALBAR


Teguh Wahyudi
Direktur

MENYETUJUI

DEWAN KOMISARIS PT JAMKRIDA KALBAR

<u>Timitius ST, CFc, CHRM, CRGP, ACA</u> Komisaris Utama	
<u>Muhammad Fahmi SE, MM, Ak, CA, CPA, CRBC, CRGP</u> Komisaris Independen	